

TESIS

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DALAM PENANGANAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN TANAH LAUT

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister (S2) Pada Program Magister Ilmu Pemerintahan**

OLEH :

WAHYU JUARI SULISTIONO

NIM : 2220421310002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
BANJARMASIN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Dalam Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir Di
Kabupaten Tanah Laut
Nama : Wahyu Juari Sulistiono
N I M : 2220421310002

Disetujui :
Komisi Penguji

Penguji I



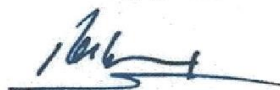
Dr. Gazali Rahman, S.Sos, M.Si
NIP. 197105301998021001

Penguji II



Dr. Jamaluddin, M.Si
NIP. 195907051989031001

Penguji III



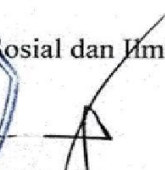
Dr. Mahyuni, S.Sos., M.AP
NIP. 197304052002121006

Diketahui :

Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Samahuddin Muharram, S.IP, M.Si
NIP. 197212272006041003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ULM,


Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos, M.Si
NIP. 197301221998021001

Tanggal Lulus : 29 Juni 2024

Tanggal Wisuda :


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Magister, atau Doktor), baik di Universitas Lambung Mangkurat maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Penelitian ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Banjarmasin, 02 Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan,


WAHYU JUARI SULISTIONO
NIM. 2220421310002

ABSTRAK

WAHYU JUARI SULISTIONO, 2220421310002, 2024, *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dalam Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Tanah Laut*, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, dibawah bimbingan Bapak Dr. Gazali Rahman, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dalam Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Tanah Laut, Pendekatan penelitian adalah dengan kualitatif dengan Lokasi di Kabupaten Tanah Laut. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan Kesimpulan. Kredibilitas data dengan Triangulasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengadopsi kerangka kerja yang terstandarisasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Namun, implementasi ini menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak, keterlambatan BPBD dalam mengeluarkan Tanggap Darurat, serta kurang optimalnya anggaran yang tersedia. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas penanganan bencana dan memerlukan koordinasi yang lebih baik antar SKPD untuk meningkatkan respons terhadap bencana banjir. Dinas Sosial memegang peran penting dalam implementasi SPM, dengan tanggung jawab menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) luar panti. Lima dasar SPM Bidang Sosial yang menjadi fokus dalam penanganan PPKS adalah korban bencana, disabilitas luar panti, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan gelandangan/pengemis. Pelaksanaan SPM ini melibatkan proses perencanaan yang terintegrasi dalam Renstra dan Renja, persiapan intervensi saat terjadi bencana, serta pengawasan dan evaluasi pasca intervensi.

Kesimpulan Penelitian ini implementasi SPM ini masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak, keterlambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengeluarkan Tanggap Darurat, dan kurang optimalnya anggaran yang tersedia. Selain itu, jumlah dan kompetensi personel yang terlibat dalam penanganan bencana juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas respons. Proses identifikasi korban dan penyusunan data awal, meskipun memakan waktu, sangat penting untuk memastikan respons yang efektif.

Kata Kunci :Implementasi, Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir, SPM Bidang Sosial

ABSTRACT

WAHYU JUARI SULISTIONO, 2220421310002, 2024, *Implementation of Minimum Service Standards (MSS) in the Social Sector in Handling Social Protection for Flood Disaster Victims in Tanah Laut Regency*, Master of Government Studies Program, Lambung Mangkurat University, under the guidance of Mr. Dr. Gazali Rahman, M.Si

This study aims to analyze the implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Social Sector in Handling Social Protection for Flood Victims in Tanah Laut Regency. The research approach is qualitative with a location in Tanah Laut Regency. Data sources come from primary and secondary data, collected using interview techniques, observation, and documentation. Data analysis uses a qualitative analysis model from Miles and Huberman which consists of data reduction, data presentation, and conclusions. Data credibility with Triangulation.

The results of this study indicate that the government has adopted a standardized framework based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 59 of 2021 concerning the Implementation of Minimum Service Standards. However, this implementation faces various obstacles, such as difficulties in providing understanding to affected communities, delays in BPBD in issuing Emergency Responses, and less than optimal available budgets. These obstacles hinder the effectiveness of disaster management and require better coordination between SKPDs to improve the response to flood disasters. The Social Service plays an important role in the implementation of SPM, with the responsibility of handling Social Welfare Service Needs (PPKS) outside the institution. The five basic SPMs in the Social Sector that are the focus in handling PPKS are disaster victims, disabilities outside the institution, neglected elderly people, neglected children, and vagrants/beggars. The implementation of this MSS involves an integrated planning process in the Renstra and Renja, preparation for interventions during disasters, and post-intervention monitoring and evaluation.

Conclusion This research on the implementation of MSS still faces various significant obstacles. These obstacles include difficulties in providing understanding to the affected community, delays in the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in issuing Emergency Response, and less than optimal available budget. In addition, the number and competence of personnel involved in disaster management are also key factors influencing the effectiveness of the response. The process of identifying victims and compiling initial data, although time consuming, is very important to ensure an effective response.

Keywords: Implementation, Social Protection for Flood Disaster Victims, MSS in the Social Sector

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dengan judul “Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dalam Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.


Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini terselesaikan karena adanya bantuan baik secara moril maupun materiel dari berbagai pihak, oleh karena itulah pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak/ibu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
3. Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat,
4. Dr. H. Samahuddin Muharram, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

5. Dr. Gazali Rahman, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab selama peneliti menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Jamaluddin, M.Si. selaku Dosen Penguji Tesis I dan Dr. Mahyuni, S.Sos., M.AP. selaku Dosen Penguji Tesis II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran beliau kepada peneliti selama menyelesaikan tesis ini.
7. Tesis ini saya persembahkan kepada Ibunda Hartuti dan almarhum ayahanda Suharyono yang menjadi alas an utama saya untuk selalu menjadi arti terhadap kehidupan yang singkat ini.
8. Tesis ini juga saya persembahkan kepada ananda tersayang Emir Husein Darmowijoto, engkau adalah masa depan ku.
9. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Pelaihari, 20 Juni 2024



Wahyu Juari Sulistiono
Nim. 2220421310002

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN TESIS	ii
PERYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Implementasi Kebijakan	15
2.2.1 Pengertian Implementasi	15
2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan	19
2.2.3 Teknik Implementasi Kebijakan	22
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	23
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	23
2.3.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	25
2.3.3 Model-Model Implementasi Kebijakan	26
2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	41
2.4.1 Pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ...	41
2.4.2 Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM)	43
2.5 Bencana di Indonesia	45
2.5.1 Konsep Penanggulangan Bencana	45
2.5.2 Pengungsi Akibat Bencana Alam dalam HAM ...	47
2.5.3 Masyarakat Rentan Bencana	51
2.5.4 Gambaran Umum Kebencanaan di Indonesia	52
2.5.5 Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Bencana Alam	60
2.6 Standar Pelayanan Minimal dalam Penanganan Bencana Banjir	62
2.6.1 Standar Pelayanan Minimal Pada Bidang Sosial	62
2.6.2 Perlindungan Sosial dalam Konteks Bencana Banjir	64
2.6.3 Standar Pelayanan Minimal dalam Pelayanan Sosial	65

	2.6.4 Tujuan dan Manfaat SPM dalam Penanganan Bencana Banjir	67
	2.7 Peran dan Tanggung Jawab <i>Stakeholder</i> dalam Implementasi SPM	69
	2.8 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implemetasi SPM	70
	2.9 Relevansi Antara Pemerintahan dengan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir	72
	2.10 Kerangka Pemikiran	75
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Pendekatan Penelitian	77
	3.2 Jenis Penelitian	78
	3.3 Fokus dan Lokus Penelitian	78
	3.4 Informan Penelitian	78
	3.5 Instrumen Penelitian	79
	3.6 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	80
	3.7 Waktu Penelitian	80
	3.8 Analisis Data	81
	3.9 Keabsahan Data	84
	3.10 Jadwal Penelitian	84
BAB IV	GAMBARAN UMUM	
	4.1 Kabupaten Tanah Laut	86
	4.1.1 Sejarah	86
	4.1.2 Kondisi Wilayah	87
	4.1.3 Penduduk	89
	4.1.4 Pekerjaan Penduduk	91
	4.1.5 Pendidikan	93
	4.1.6 Visi dan Misi	95
	4.2 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	96
	4.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	96
	4.2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	101
	4.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	103
	4.2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	105
	4.2.5 Tujuan dan Sasaran	107
	4.3 Rekap Bencana Banjir Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	109
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	5.1 Hasil Penelitian	111
	5.1.1 Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dalam Penanganan Perlindungan	112

	Sosial Korban Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut	
5.1.2	Faktor-faktor Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir	126
5.1.2.1	Faktor Individual	127
5.1.2.2	Faktor Sosial	129
5.1.2.3	Faktor Kultural	131
5.1.2.4	Faktor Penguasaan Sumber Daya	133
5.2	Pembahasan	135
BAB VI	PENUTUP	
6.1	Kesimpulan	138
6.2	Saran	139
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1	SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota	4
2	Jadwal Penelitian	85
3	Kecamatan/Desa di Kabupaten Tanah Laut	88
4	Jumlah Penduduk di Kabupaten Tanah Laut	90
5	Persentase Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	92
6	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Kab. Tanah Laut 2023/2024	93
7	Uraian Tugas Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	98
8	Faktor Tantangan dan Faktor Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	104
9	Rekap Bencana Banjir Kabupaten Tanah Laut 2024	109

DAFTAR BAGAN

No.	Judul	Hal
1	Implementasi menurut Van Meter & Van Horn.....	27
2	Implementasi menurut Marille S. Grindle.....	31
3	Faktor Penentu Implementasi menurut Edwards III.....	33
4	Kerangka Pemikiran.....	76
5	Model Analisis Interaktif.....	83

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1	Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut	112
2	Observasi Lapangan di Lokakasi Bencana Banjir	114
3	Aparat Pelaksana Implementasi SPM Bidang Sosial	116
4	Persiapan Membagikan Bantuan Kepada Korban Bencana Banjir	119
5	Dapur Umum Korban Bencana Banjir	122
6	Relawan Beserta Aparat di Lokasi Bencana Banjir	130
7	Pembagian Bantuan Kepada Korban Bencana Banjir	132